

## RESUME

### HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-3 PADA IUI KPRI BINA KARYA MANDIRI SURABAYA DI KOTA SURABAYA

#### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
  - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO  
Jl Ir H Juanda – Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

| No. | Nama                    | Fungsi/Jabatan  |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1.  | Rupita Nilansari, S.Hut | Ketua Tim Audit |
| 2.  | Anjar Guntoro, S.Hut    | Anggota         |

- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

#### 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya
- b. Alamat / Lokasi Industri : Jl Dukuh Menanggal III No. 29 Kota Surabaya, Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
- d. SK IUI : No. 536/67E/436.7.5/2016 Tanggal 27 September 2016
- e. Email : [kikiptcsby@yahoo.co.id](mailto:kikiptcsby@yahoo.co.id)
- f. Ketua Koperasi : Ngari, Sp.d
- g. *Management Representatif* : Christriany

### 3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Pertemuan Pembukaan                       | 9 Oktober 2019,<br>KPRI Bina Karya Mandiri<br>Surabaya di Surabaya      | Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :<br>a. Pengenalan Susunan Tim Audit.<br>b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.<br>c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.<br>d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.<br>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 9 - 10 Oktober 2019,<br>KPRI Bina Karya Mandiri<br>Surabaya di Surabaya | Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.   |
| Pertemuan Penutupan                       | 10 Oktober 2019,<br>KPRI Bina Karya Mandiri<br>Surabaya di Surabaya     | Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.<br>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.  |
| Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3      | Bogor,<br>31 Oktober 2019   | a. KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya dinyatakan <b>MEMENUHI</b> standar verifikasi legalitas kayu pada IUI.<br>b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.   |

## 4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|---|-------|---|
|     | Kode     | Judul   |       |   |
| 1.  | 1.1.1.a  | Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.  | M     | <p>Akta pendirian perkumpulan KPRI Balai Latihan Kerja Industri Surabaya tgl 9 Desember 1982 telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Koperasi Kantor Wilayah Jawa Timur dengan badan hukum nomor 5525/BH/II/83 tgl 30 September 1983.</p> <p>Akta perubahan anggaran dasar tgl 29 Desember 1995 a.n. KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil republik Indonesia No. 290/PAD/KWK.13/25.1 /VIII/96 tgl 12 Agustus 1996.</p> <p>Koperasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3578030030044 dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.</p> |
| 2.  | 1.1.1.b  | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. | M     | <p>SIUP Kecil No. 503/7810.A/436.7.5/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (a.n.) Walikota Pemerintah Kota Surabaya. Berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Koperasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya, NIB 8120015160214 dengan KBLI 46491 -</p>   |



| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|---|-------|---|
|     | Kode     | Judul   |       |   |
|     |          |   |       | Furniture dari kayu, dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019 dan telah berlaku efektif.   |
| 3.  | 1.1.1.c  | Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).                    | N/A   | Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   |
| 4.  | 1.1.1.d  | Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | M     | NIB No. 13.01.2.46.00078 tanggal 01 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya. Berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2021.<br>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015160214 kepada operasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya dengan KBLI 31001, 46491, 64141, ditetapkan tanggal 01 November 2018. |
| 5.  | 1.1.1.e  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | M     | NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.<br>a. NPWP 01.510.336.9-609.000 atas nama KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya.<br>b. SKT No. S-6536KT/WPJ.11/KP.0703/2017 tanggal 13 Oktober 2017.<br>c. SPPKP No. KEP-05464/WPJ.09/KP.0703/2000 tanggal 26 Januari 2000.   |
| 6.  | 1.1.1.f  | Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan | M     | Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi No. 660.1/26/436.7.2/2014 tanggal 24 Januari 2014   |



| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|--|-------|--|
|     | Kode     | Judul  |       |  |
|     |          | hidup lain yang setara).   |       | <p>dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.</p> <p>KPRI Bina Karya Mandiri telah menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2018 dengan bukti tanda terima tanggal 22 Februari 2019 dan Laporan Hasil Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun 2019 dengan bukti tanda terima tanggal 08 Oktober 2019 kepada Dins Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya.</p> <p>Terdapat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor : 660.1/779/Kep/436.7.12/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Gedung Pusat Latihan Kejuruan Industri Surabaya (Produksi Furniture KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya).</p>   |
| 7.  | 1.1.1.g  | IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT). | M     | <p>Izin Usaha Industri (IUI) No. 536/67E/436.7.5/2016 tanggal 27 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya a.n. Walikota Surabaya. Jenis dan kapasitas produksi terpasang : Meja, Kursi, Bangku, Tempat Tidur, Lemari, Rak Buku, Kitchen Set, Furniture dan kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (KBLI : 31001) kapasitas 400 m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada Koperasi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya, NIB 8120015160214 dengan KBLI 31001 - Industri Furniture dari kayu, dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019 dan telah berlaku efektif.</p> |



| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|--|-------|--|
|     | Kode     | Judul  |       |  |
| 8.  | 1.1.1.h  | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.   | N/A   | KPRI Bina Karya Mandiri tidak memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI. |
| 9.  | 1.2.1.   | Dokumen identitas importir.  | N/A   | Sampai dengan pelaksanaan kegiatan audit Penilikan ke- 3 KPRI Bina Karya Mandiri tidak terdaftar sebagai Importir.                             |
| 10. | 1.2.2    | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, tidak ada realisasi kegiatan impor kayu atau produk turunannya oleh KPRI Bina Karya Mandiri.   |
| 11. | 1.3.1.a  | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.   | N/A   | KPRI Bina Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.   |
| 12. | 1.3.1.b  | Internal audit anggota.  | N/A   |  |

**PRINSIP 2.**

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|---|-------|---|
|     | Kode     | Judul   |       |   |
| 1.  | 2.1.1.a  | Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri menerima bahan baku berupa kayu gergajian, veneer, dan MDF. Pembelian bahan baku tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti bank keluar dan kwitansi/bukti setoran. |
| 2.  | 2.1.1.b  | Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).   | N/A   | KPRI Bina Karya Mandiri merupakan pemegang IUI lanjutan dan tidak memiliki hak untuk menerima serta mengolah kayu bulat dari hutan negara maupun  |



| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|---|-------|---|
|     | Kode     | Judul   |       |   |
|     |          |   |       | rakyat.   |
| 3.  | 2.1.1.c  | Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.         | M     | Seluruh penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti serah terima kayu berupa berita acara jual beli dan surat jalan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.  |
| 4.  | 2.1.1.d  | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | M     | <p>Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri menerima bahan baku :</p> <p>a. Kayu gergajian sebanyak 151,2875 m<sup>3</sup> dengan dilengkapi dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan sebanyak 10 dokumen.</p> <p>b. Veneer sebanyak 0,4622 m<sup>3</sup> dengan dilengkapi dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan sebanyak 3 dokumen.</p> <p>c. MDF sebanyak 1.130 pcs dengan dilengkapi 7 dokumen surat jalan.</p> <p>Hasil uji petik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya.</p> <p>Terdapat kesesuaian jumlah penerimaan bahan baku antara dokumen LMK dengan dokumen angkutan hasil hutannya.</p> <p>Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri tidak ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu lelang</p> |
| 5.  | 2.1.1.e  | Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.  |



| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|---|-------|--|
|     | Kode     | Judul   |       |  |
|     |          | kyu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.       |       |  |
| 6.  | 2.1.1.f  | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                  | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.  |
| 7.  | 2.1.1.g  | Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.      | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya menerima bahan baku dari 3 pemasok yang telah memiliki S-LK dengan status aktif dan 3 pemasok yang menerbitkan DKP.<br>KPRI Bina Karya Mandiri telah memiliki Prosedur pengecekan DKP dan petugas pengecekan DKP yang dibuktikan dengan surat penunjukkan. KPRI telah menyusun laporan pengecekan DKP. |
| 8.  | 2.1.1.h  | Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. | N/A   | Sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.  |
| 9.  | 2.1.1.i  | Dokumen pendukung RPBBI.  | N/A   | KPRI Bina Karya Mandiri tidak memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK) sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI beserta dokumen pendukungnya.   |
| 10. | 2.1.2.a  | Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, tidak ada realisasi kegiatan impor kayu atau produk turunannya oleh KPRI Bina Karya Mandiri.   |
| 11. | 2.1.2.b  | <i>Bill of Lading</i> (B/L).  | N/A   |  |
| 12. | 2.1.2.c  | <i>Packing List</i> (P/L).  | N/A   |  |
| 13. | 2.1.2.d  | <i>Invoice</i> .  | N/A   |  |
| 14. | 2.1.2.e  | Deklarasi.  | N/A   |  |
| 15. | 2.1.2.f  | Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea                              | N/A   |  |





| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|--|-------|---|
|     | Kode     | Judul  |       |   |
|     |          | masuk).  |       |   |
| 16. | 2.1.2.g  | Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A   |   |
| 17. | 2.1.2.h  | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | N/A   |   |
| 18. | 2.1.3.a  | <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                  | M     | Tersedia <i>tallysheet</i> / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.   |
| 19. | 2.1.3.b  | Laporan produksi hasil olahan.   | M     | Realisasi produksi berdasarkan <i>job order buyer/per invoice</i> periode Oktober 2018 s/d September 2019 yaitu furniture sejumlah 118,1410 m <sup>3</sup> dengan <i>input</i> produksi sejumlah 243,6273 m <sup>3</sup> , rendemen rata-rata 48,49 %.<br>Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen. |
| 20. | 2.1.3.c  | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | M     | Jenis dan realisasi produksi telah sesuai dengan kapasitas izin produksi terpasang. Realisasi produksi adalah sebagai berikut :<br>a) Januari s/d Desember 2018 : furniture sebanyak 76,4179 m <sup>3</sup> (19,10 %)<br>b) Januari s/d September 2019 : furniture sebanyak 79,4414 m <sup>3</sup> (19,86 %)                    |
| 21. | 2.1.3.d  | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu lelang.  |
| 22. | 2.1.3.e  | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   | M     | Tersedia catatan/laporan mutasi kayu beserta dokumen pendukungnya.  |
| 23. | 2.1.4.a  | Dokumen S-LK atau DKP.   | N/A   | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan  |
| 24. | 2.1.4.b  | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee  | N/A   |   |



| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI                        |
|-----|----------|--|-------|--|
|     | Kode     | Judul  |       |  |
|     |          | dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   |       | penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa. |
| 25. | 2.1.4.c  | Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | N/A   |  |
| 26. | 2.1.4.d  | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | N/A   |  |
| 27. | 2.1.4.e  | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | N/A   |  |

**PRINSIP 3.**

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|---|-------|--|
|     | Kode     | Judul                                   |       |  |
| 1.  | 3.1.1.   | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memperdagangkan/memindatangkan produk furniture sebanyak 1.269 unit / 14,9659 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi 21 dokumen.<br>Seluruh penjualan lokal produk furniture dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan didukung dengan faktur penjualan. |
| 2.  | 3.2.1.a  | Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | M     | Produk furniture yang diekspor KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stock produk jadi, hasil produksi dan penjualan ekspor.  |



| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|---|-------|--|
|     | Kode     | Judul   |       |  |
|     |          |   |       | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memperdagangkan/memindatangkan produk furniture sebanyak 2.361 unit / 103,1751 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi 12 dokumen pelengkap ekspor.  |
| 3.  | 3.2.1.b  | Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                  | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen-dokumen tersebut.   |
| 4.  | 3.2.1.c  | <i>Packing List</i> (P/L).  | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen-dokumen tersebut.   |
| 5.  | 3.2.1.d  | <i>Invoice</i> .  | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen-dokumen tersebut.   |
| 6.  | 3.2.1.e  | <i>Bill of Lading</i> (B/L).  | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen-dokumen tersebut.   |
| 7.  | 3.2.1.f  | Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal. | M     | Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen-dokumen tersebut.<br><br>Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil |



| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|--|-------|---|
|     | Kode     | Judul  |       |   |
|     |          |  |       | produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya.   |
| 8.  | 3.2.1.g  | Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.        | N/A   | Selama Periode Oktober 2018 s/d September 2019, seluruh produk yang dihasilkan KPRI Bina Karya Mandiri tidak termasuk produk kayu yang wajib verifikasi teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. |
| 9.  | 3.2.1.h  | Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.   | N/A   | Selama Periode Oktober 2018 s/d September 2019, seluruh produk yang dihasilkan KPRI Bina Karya Mandiri tidak termasuk produk kayu yang wajib dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.   |
| 10. | 3.2.1.i  | Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A   | Selama Periode Oktober 2018 s/d September 2019, seluruh produk yang dihasilkan KPRI Bina Karya Mandiri tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.   |
| 11. | 3.3.1.   | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.                                       | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk.   |

## PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

| NO. | VERIFIER |  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|-----|----------|--|-------|---|
|     | Kode     | Judul  |       |   |
| 1.  | 4.1.1.a  | Pedoman/prosedur K3.   | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah memiliki prosedur K3 dan Penanggung Jawab K3 sesuai Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 No. 063/KPRI.BKM/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019.  |
| 2.  | 4.1.1.b  | Implementasi K3.   | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang terpasang di lokasi produksi, berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia peralatan APD (Alat Pelindung Diri) yang cukup dan berfungsi dengan baik. Berdasarkan observasi dilapangan, para pekerja di KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya telah mengimplementasikan pemakaian APD saat bekerja. Rambu – rambu K3 seperti tanda jalur evakuasi, tanda titik kumpul, dan rambu – rambu himbauan atau larangan telah terpasang di areal produksi. |
| 3.  | 4.1.1.c  | Catatan kecelakaan kerja.  | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2018 s/d September 2019 yang tertuang dalam bentuk tabel memuat informasi tanggal kejadian, nama dan status korban, uraian kronologi kecelakaan dan upaya penanganan. Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja yang telah mendapatkan tindakan medis.  |
| 4.  | 4.2.1    | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk | M     | Berdasarkan hasil wawancara pada saat observasi lapangan diketahui bahwa di lingkungan kerja KPRI Bina Karya Mandiri belum terbentuk serikat pekerja dan  |



| NO. | VERIFIER |   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|----------|---|-------|--|
|     | Kode     | Judul   |       |  |
|     |          | membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.           |       | terdapat kebebasan berserikat pagi pekerja. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Manager Production Training Center (Unit Produksi KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya), Sdri Christriany tanggal 09 Oktober 2019 perihal kebebasan mengikuti atau membentuk serikat pekerja.  |
| 5.  | 4.2.2    | Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja. | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya memiliki dokumen peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 560/228/436.7.8/PP-54/2019 tanggal 15 Maret 2019. Peraturan Perusahaan berlaku sejak 19 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2020.   |
| 6.  | 4.2.3    | Pekerja yang masih di bawah umur.                                 | M     | KPRI Bina Karya Mandiri Surabaya/PTC mempekerjakan 40 orang tenaga kerja dengan status karyawan bulanan, karyawan harian dan karyawan lepas. Berdasarkan daftar karyawan per tanggal 01 Oktober 2019, karyawan termuda adalah Sdr. Fathur Rizky R sebagai karyawan lepas yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2001 dan mulai bekerja pada tanggal 15 Juli 2019 (pada saat mulai bekerja berumur 18 tahun 9 bulan). Tidak terdapat pekerja yang msih di bawah umur. |

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 31 Oktober 2019  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

W. Kurnia, IPU  
Direktur